



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68, Telp/Fax. 0511 – 4799 507  
MARABAHAN – 70511  
<http://bkd.baritokualakab.go.id> | email : [bapegdiklat@baritokualakab.go.id](mailto:bapegdiklat@baritokualakab.go.id)

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN  
INDIKATOR KINERJA**



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2017-2022**

**MARABAHAN, 30 MEI 2018**

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

Nomor : 188.45/ 19 /BKPP/2018

Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Presentase PNS yang memenuhi kompeten	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai	BKPP Kabupaten Barito Kuala	85 %	89 %	92 %	96 %	100 %
	Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat dan semua bidang		80 %	85%	90 %	95 %	100 %

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BARITO KUALA**



**Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si**  
NIP. 19600901198202 1 005

Lampiran II Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.

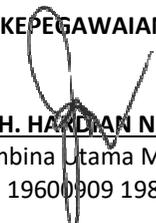
Nomor : 188.45/ 19 /BKPP/2018

Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BARITO KUALA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Presentase PNS yang memenuhi kompeten	BKPP Kabupaten Barito Kuala	Masih perlunya peningkatan kompetensi PNS agar dalam memberikan pelayanan bisa optimal	$\frac{\sum \text{Pegawai yang kompeten}}{\sum \text{Total Pegawai se Kab. Batola}} \times 100\%$	Daftar peserta diklat	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas	Indeks Kepuasan PNS terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian		Untuk memberikan pelayanan prima pada para pegawai	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$		

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

  
**Drs. H. HARDIAN NOOR, M.SI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19600909 198202 1 005

Lampiran III Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.  
 Nomor : 188.45/ 19 /BKPP/2018  
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Sasaran 8 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase ASN yang lulus Diklat minimal dengan nilai cukup memuaskan	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai	BKPP Kabupaten Barito Kuala	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas	Persentase PNS Tugas belajar yang lulus tepat waktu	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pemenuhan kebutuhan pegawai terhadap formasi pegawai	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase PNS yang lulus Ujian Dinas dan ujian Penyesuaian Ijazah	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentasi Pejabat Struktural yang sesuai dengan kompetensi Jabatan	Bidang Mutasi Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase penyelesaian Pensiun PNS yang tepat waktu	Bidang Mutasi Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase penyelesaian usul kenaikan pangkat yang selesai diproses sesuai standar	Bidang Mutasi Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		1 : 400 (0.25%)	1 : 400 (0.25%)	1 : 400 (0.25%)	1 : 400 (0.25%)	1 : 400 (0.25%)
			Persentase PNS yang mengangkat sumpah/janji	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase cakupan layanan kesejahteraan pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase data informasi Kepegawaian yang update dan akurat	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase PNS yang mematuhi ketentuan pakaian dinas	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		0 %	100 %	0 %	0 %	0 %

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si**  
NIP. 19600909 198202 1 005

Lampiran IV Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala .  
 Nomor : 188.45/ 19 /BKPP/2018  
 Tanggal : 30 Mei 2018

**ALASAN, FORMULASI/CARA PENGUKURAN DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III)  
 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BARITO KUALA**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Persentase ASN yang lulus Diklat minimal dengan nilai cukup memuaskan	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai	BKPP Kabupaten Barito Kuala	Masih perlunya peningkatan kompetensi PNS agar dalam memberikan pelayanan bisa optimal	$\frac{\sum \text{PNS lulus diklat dengan Nilai Cukup memuaskan}}{\sum \text{ASN yang mengikuti Diklat}} \times 100 \%$	Daftar peserta Diklatpim Tk. II, III dan IV	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
	Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas	Persentase PNS Tugas belajar yang lulus tepat waktu	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		Masih perlunya peningkatan kompetensi PNS agar dalam memberikan pelayanan bisa optimal	$\frac{\sum \text{ASN tugas belajar yang lulus tepat waktu}}{\sum \text{Asn yang mengikuti tugas belajar}} \times 100 \%$	SK Tugas Belajar	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
		Persentase Pemenuhan kebutuhan pegawai terhadap formasi pegawai	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		Untuk mengisi kekosongan formasi pegawai akibat Pensiun dan pindah tugas keluar Kab. Batola	$\frac{\sum \text{usulan Formasi yang disetujui}}{\sum \text{usulan Formasi}} \times 100\%$	Daftar formasi yang disetujui Kementerian	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Persentase PNS yang lulus Ujian Dinas dan ujian Penyesuaian Ijazah	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		Masih perlunya peningkatan kompetensi PNS agar dalam memberikan pelayanan bisa optimal	$\frac{\sum \text{ASN yang lulus Ujian dinas Dan ujian penyesuaian ijazah}}{\sum \text{ASN yang mengikuti ujian dinas dan Ujian penyesuaian ijazah}} \times 100\%$	Daftar peserta ujian	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Persentasi Pejabat Struktural yang sesuai dengan kompetensi Jabatan	Bidang Mutasi Pegawai		Untuk mengisi formasi jabatan struktural dan jabatan lainnya	$\frac{\sum \text{Jabatan Struktural yang terisi}}{\sum \text{Total Jabatan struktural}} \times 100\%$	Daftar pejabat struktural	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Persentase penyelesaian Pensiun PNS yang tepat waktu	Bidang Mutasi Pegawai		Untuk memproses pensiun PNS tepat waktu	$\frac{\sum \text{Realisasi usul pensiun}}{\sum \text{Usul pensiun}} \times 100\%$	SK Pensiun	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
		Persentase penyelesaian usul kenaikan pangkat yang selesai diproses sesuai standar	Bidang Mutasi Pegawai		Untuk memproses Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	$\frac{\sum \text{Realisasi usul kenaikan pangkat}}{\sum \text{target usulan kenaikan pangkat}} \times 100 \%$	SK pangkat	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Persentase PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memroses pelanggaran disiplin PNS	$\frac{\sum \text{PNS dijatuhi hukuman disiplin}}{\sum \text{PNS seluruh se Kab. Batola}} \times 100 \%$	Surat rekomendasi	PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
		Persentase PNS yang mengangkat sumpah/janji	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada pegawai	$\frac{\sum \text{Peserta yang mengikuti sumpah/janji PNS}}{\sum \text{CPNS yang diangkat}} \times 100 \%$	Daftar peserta mengikuti sumpah/janji	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Persentase PNS yang mematuhi ketentuan pakaian dinas	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada pegawai	$\frac{\sum \text{PNS yang mematuhi ketentuan Pakaian dinas}}{\sum \text{total PNS se Kab. Batola}} \times 100 \%$	Daftar nominatif PNS sekab batola	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (ESELON III)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
		Persentase cakupan layanan kesejahteraan pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada pegawai	$\frac{\sum \text{Layanan yang diberikan kepada PNS}}{\sum \text{PNS se Kab. Batola}} \times 100 \%$	Daftar nominatif layanan	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
		Persentase data informasi Kepegawaian yang update dan akurat	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Perlunya ketersediaan data kepegawaian yang akurat	$\frac{\sum \text{Data informasi PNS update}}{\sum \text{PNS se Kab. Batola}} \times 100 \%$	Daftar nominatif seluruh PNS	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si**  
NIP. 19600909 198202 1 005

Lampiran V Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.  
 Nomor : 188.45/ 19 /BKPP/2018  
 Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Sasaran 8 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim II, III, dan IV	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		44 PNS	74 PNS	88 PNS	155 PNS	140 PNS
			Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		24 PNS	114 PNS	131 PNS	155 PNS	140 PNS
			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		59 PNS	84 PNS	80 PNS	80 PNS	80 PNS
			Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		50	50	50	50	50

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas	Jumlah CPNS yang diangkat	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		114 pelamar lulus test	131 pelamar lulus test	155 pelamar lulus test	140 pelamar lulus test	172 pelamar lulus test
			Jumlah PPPK yang diangkat	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		0 orang	73 orang	55 orang	40 orang	72 orang
			Jumlah formasi ASN berdasarkan kebutuhan	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		114 Formasi	131 formasi	155 formasi	140 formasi	172 formasi
			Jumlah PNS yang mengikuti TUBEL	Bidang Diklat, Bangpeg		3 PNS	7 PNS	6 PNS	6 PNS	6 PNS
			Jumlah Jabatan yang terisi akibat mutasi/promosi	Bidang Mutasi Pegawai		12 Rekomendasi				
			Jumlah Calon JPT yang lulus seleksi	Bidang Mutasi Pegawai		6 PNS	5 PNS	2 PNS	2 PNS	1 PNS

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah SK pensiun yang selesai diproses	Bidang Mutasi Pegawai		100 PNS				
			Jumlah PNS yang dilayani naik pangkat sesuai SOP	Bidang Mutasi Pegawai		600 PNS				
			Jumlah rekomendasi proses hukuman disiplin dan ijin kawin/cerai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		12 Rekomendasi				
			Jumlah PNS yang paham terhadap peraturan kepegawaian	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		0 PNS	150 PNS	150 PNS	150 PNS	150 PNS
			Jumlah CPNS yang mengikuti sumpah/janji PNS	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		114 CPNS	131 CPNS	155 CPNS	140 CPNS	172 CPNS
			Jumlah usul Karis/Karsu/Karpeg /KPE yang selesai diproses	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		200 PNS	160 PNS	160 PNS	100 PNS	50 PNS

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA				
	SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah usul cuti yang selesai diproses	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		700 PNS	700 PNS	700 PNS	700 PNS	700 PNS
			Jumlah usul kenaikan gaji berkala yang selesai diproses	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		2200 PNS	2200 PNS	2200 PNS	2200 PNS	2200 PNS
			Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		20 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
			Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		386 PNS	393 PNS	393 PNS	393 PNS	393 PNS
			Jumlah informasi/data kepegawaian yang dapat dipenuhi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		1500 PNS	1500 PNS	1500 PNS	1500 PNS	1500 PNS
			Jumlah pakaian dinas (PDH) beserta perlengkapannya	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		0 PNS	5.000 PNS	0 PNS	0 PNS	0 PNS

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

  
Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si  
NIP. 19600909 198202 1 005

Lampiran VI Keputusan Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.  
Nomor : 188.45/ 19 /BKPP/2018  
Tanggal : 30 Mei 2018

**ALASAN, FORMULASI/CARA PENGUKURAN DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA (ESELON IV)  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BARITO KUALA**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	Jumlah CPNS yang diangkat	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai	BKPP Kabupaten Barito Kuala	Untuk mengisi kekosongan formasi pegawai akibat Pensiun dan pindah tugas keluar Kab. Batola	∑ Peserta yang lulus test CPNS	Pengumuman hasil seleksi CPNS	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Jumlah PPPK yang diangkat				∑ Peserta yang lulus test PPPK		
		Jumlah formasi pegawai berdasarkan kebutuhan	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai	Untuk mengisi kekosongan formasi pegawai akibat Pensiun dan pindah tugas keluar Kab. Batola	∑ Formasi pegawai berdasarkan kebutuhan	Usulan E-formasi	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
	Meningkatkan pelayanan Aparatur yang berkualitas	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim II, III, dan IV	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		Masih perlunya peningkatan kompetensi PNS agar dalam memberikan pelayanan bisa optimal	∑ Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan TK. II, III dan IV	Daftar peserta Diklat Prajabatan	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai			∑ CPNS yang telah Mengikuti Diklat Prajabatan	Daftar peserta Diklat Kepemimpinan	PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai			∑ PNS yang mengikuti Diklat Fungsional/teknis	Daftar peserta Diklat Teknis/Fungsi	
		Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan ujian penyesuaian ijazah yang lulus	Bidang Diklat, Pengembangan Pegawai		Masih perlunya peningkatan kompetensi PNS agar dalam memberikan pelayanan bisa optimal	∑ PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Daftar kelulusan	PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	Bidang Diklat Pengembangan pegawai		Masih perlunya peningkatan pendidikan formal bagi PNS	∑ PNS yang mengikuti tugas belajar	Daftar PNS tubel	PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		Jumlah Jabatan yang terisi akibat	Bidang Mutasi Pegawai		Untuk mengisi kekosongan	∑ Surat Rekomendasi	Surat Rekomendasi	PP No 11 Thn 2017 tentang

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
		mutasi/promosi			formasi pegawai akibat Pensiun dan pindah tugas keluar Kab. Batola			Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		Persentase Calon JPT yang lulus seleksi	Bidang Mutasi Pegawai		Untuk mengisi kekosongan formasi pegawai akibat Pensiun dan pindah tugas keluar Kab. Batola	∑ Peserta yang lulus test	Daftar peserta yang lulus	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Jumlah SK pensiun yang selesai diproses	Bidang Mutasi Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada pegawai	∑ SK pensiun yang telah terbit	SK pensiun	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Jumlah PNS yang dilayani naik pangkat sesuai SOP	Bidang Mutasi Pegawai		Untuk memberikan pelayanan	∑ SK kenaikan pangkat yang Telah terbit	SK pangkat	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
					prima pada pegawai			Aparatur Sipil Negara
		Jumlah rekomendasi proses hukuman disiplin dan ijin kawin/cerai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memroses pelanggaran disiplin PNS	∑ Surat Rekomendasi	Surat Rekomendasi	PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
		Jumlah PNS yang paham terhadap peraturan kepegawaian	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk meningkatkan wawasan PNS tentang Peraturan Kepegawaian	∑ PNS yang paham terhadap Peraturan Kepegawaian	Daftar peserta Sosialisasi	PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS
		Jumlah CPNS yang mengikuti sumpah/janji PNS	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada para pegawai	∑ Peserta yang mengikuti sumpah/janji PNS	Daftar peserta mengikuti sumpah/janji	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Jumlah usul Karis/Karsu/Karpeg /KPE yang selesai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan		Untuk memberikan pelayanan	∑ Surat kepegawaian yang diterbitkan oleh BKN	Surat usul kartu kepegawaian	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
		diproses	Pegawai		prima pada para pegawai			Negara
		Jumlah usul cuti yang selesai diproses	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada para pegawai	∑ Surat cuti yang diterbitkan	Surat cuti	PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		Jumlah usul kenaikan gaji berkala yang selesai diproses	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			∑ Surat Kenaikan Gaji berkala yang Selesai diproses	Surat kenaikan gaji berkala	PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen PNS
		Jumlah PNS yang mendapat penghargaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			∑ PNS yang mendapat penghargaan	Hasil seleksi PNS berprestasi	PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		Jumlah PNS yang menerima Satyalancana Karya Satya	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			∑ PNS yang mendapatkan penghargaan dari Presiden	Daftar nominatif Satyalancana Karya Satya	PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (ESELON IV)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
SASARAN RPJM	SASARAN RESTRA				PENJELASAN ALASAN MEMILIH INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/CARA PENGUKURAN		
		Jumlah informasi/data kepegawaian yang dapat dipenuhi	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada para pegawai	$\Sigma$ Data kepegawaian yang dapat dipenuhi	Daftar Nominatif	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
		Jumlah pakaian dinas (PDH) beserta perlengkapannya	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai		Untuk memberikan pelayanan prima pada para pegawai	$\Sigma$ PNS se Batola	Data PNS se Kabupaten Barito Kuala	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

  
Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si

NIP. 19600909 198202 1 005





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68, Telp/Fax. 0511 – 4799 507

MARABAHAN – 70511

<http://bkd.baritokualakab.go.id> | email : [bkd@baritokualakab.go.id](mailto:bkd@baritokualakab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**NOMOR : 188.45/ 18 /BKPP/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN POHON KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan kinerja utama dan indikator kinerja untuk masing-masing eselon secara hirarki pada unit kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perlu menetapkan pohon kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2018, tanggal 4 Mei 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pohon kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

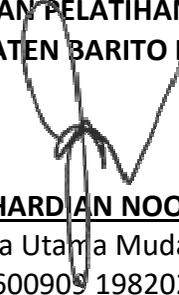
**KEDUA** : Pohon kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Pohon kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala  
pada tanggal, 30 Mei 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19600909 198202 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68, Telp/Fax. 0511 – 4799 507

MARABAHAN – 70511

<http://bkd.baritokualakab.go.id> | email : [bkd@baritokualakab.go.id](mailto:bkd@baritokualakab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**NOMOR : 188.45/ 19 /BKPP/2018**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2018, tanggal 4 Mei 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Pohon kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barito Kuala  
pada tanggal, 30 Mei 2018  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs. H. HARDIAN NOOR, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19600909 198202 1 005